

Analisis Kemampuan Daya Beli Dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Dampak Kenaikan Ppn 12%

Heni Renani¹, Ebil Mareta Rizal², Usnia Wati Keristin³

^{1,2,3}Universitas Multi Data Palembang -¹henirenani_2420210058@mhs.mdp.ac.id

-²ebilmaretarizal_2428210021@mhs.mdp.ac.id

-³tityn123@gmail.com

Abstract— The Indonesian government has implemented a Value Added Tax (VAT) increase to 12% starting in January 2025, in accordance with Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization. Previously, the VAT rate increased from 10% to 11% in April 2022. The 12% VAT is applied to luxury goods and services, such as exclusive vehicles and high-value properties, which are generally consumed by the upper-middle-class economic group. This study analyzes the impact of the VAT increase on the upper-middle-class society using a quantitative approach and incidental data selection technique. A sample of 100 respondents was calculated using Slovin's formula from the population of workers aged 18 years and above. Data analysis was conducted through multiple linear regression using SPSS, including t-test, F-test, and coefficient of determination test. The results show that purchasing power has a positive but insignificant effect on the VAT increase, as the tax only applies to luxury goods, while basic needs remain VAT-exempt. On the other hand, societal welfare has a significant impact, where the VAT increase may reduce GDP and increase the number of poor people due to inflation. The coefficient of determination indicates that purchasing power and welfare variables explain 95.9% of the variation in the VAT increase. The implications of this study emphasize the need for compensation policies to mitigate the economic impact on vulnerable groups. The government should consider tax incentives or subsidies to maintain welfare and purchasing power stability. This study is expected to serve as a reference for policymakers in formulating more inclusive fiscal policies that comprehensively consider socio-economic impacts.

Keywords: VAT, purchasing power, societal welfare

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran penting dalam menopang keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Tarmizi, 2023). Dalam konteks global, kenaikan pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah diterapkan di berbagai negara sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran (Kisdayanti et al., 2025). Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial.

Namun, kebijakan ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat dan dunia usaha. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat. Hajatina & Hasanah (2024) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berkontribusi pada peningkatan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi rumah tangga. Studi Lee & Harianto (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Sementara itu, penelitian di Uni Eropa menemukan bahwa setiap kenaikan tarif PPN sebesar satu persen dapat menurunkan konsumsi agregat hingga satu persen dalam jangka pendek (Fadilah et al., 2024). Selain itu, Fitriani & Susanti (2024) menyatakan kebanyakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung lebih terdampak karena beban pajak yang lebih tinggi terhadap kebutuhan pokok.

Banyak pendapat dan berita yang menyoroti potensi dampak positif dari kebijakan kenaikan PPN. Fitriani & Susanti (2024) menemukan bahwa peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan tanpa menyebabkan inflasi yang berlebihan, terutama jika diimbangi dengan kebijakan fiskal yang efektif. Podungge et al. (2024) menyoroti bahwa dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mendorong efisiensi konsumsi masyarakat, dengan mendorong pola konsumsi yang lebih selektif antara kebutuhan primer dan sekunder. Selain itu, penelitian oleh Aulia et al. (2024) menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Meskipun banyak penelitian telah membahas dampak kenaikan PPN, sebagian besar studi belum secara spesifik menganalisis efek dari kebijakan ini dalam konteks ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengevaluasi dampak kenaikan PPN terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke atas. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi akademisi, praktisi ekonomi, serta pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi kebijakan pajak yang lebih efektif dan berimbang.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Populasi yang diteliti adalah masyarakat Indonesia yang berusia minimal 18 tahun. Untuk menentukan jumlah responden, digunakan rumus Slovin dengan standar error 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis, uji F, dan uji R².

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas diterapkan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel dengan akurat dan konsisten. Dalam penelitian ini, dua belas pertanyaan dianalisis menggunakan uji validitas sesuai prosedur. Suatu data dikatakan valid apabila nilai Corrected item-total correlation atau r hitung lebih besar dari r tabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua dua belas pertanyaan dalam kuesioner memiliki nilai valid, karena setiap r hitung melebihi r tabel (lihat Tabel 1):

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	33.7400	84.901	.909	.979
x1.2	34.1400	87.576	.938	.978
x2.1	33.8900	89.271	.932	.978
x2.2	33.3400	92.833	.927	.980
x2.3	34.0300	91.868	.900	.980
x2.4	33.6400	84.893	.925	.979
x2.5	33.7500	88.513	.932	.978
y.1	33.5900	83.578	.840	.983
y.2	34.1300	89.003	.911	.979
y.3	33.7900	89.339	.927	.979
y.4	33.2100	93.925	.877	.980
y.5	33.9900	88.252	.945	.978

Data kemudian diolah menggunakan uji reliabilitas untuk mendapatkan apakah data tersebut reliabel atau memiliki konsistensi dalam penelitian. Analisis reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha 0.981, yang melebihi nilai 0.1874, sehingga data tersebut dianggap reliabel. (lihat Tabel 2).

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.981	12

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif terlihat seperti pada Tabel 3 di bawah ini., terdapat minimum, maksimum, mean, standar deviation sebagai penggambaran deskripsi suatu data. Masing-masing variabel memiliki hasil yang berbeda, seperti X1 memiliki mean 5.8000 dan X2 memiliki mean 15.5500, akan tetapi untuk hasil N statistik menunjukkan terdapat 100 data yang diuji.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemampuan daya beli	100	2.00	8.00	5.8000	2.02510
Kesejahteraan masyarakat	100	6.00	20.00	15.5500	4.07102
Kenaikan PPN 12%	100	5.00	20.00	15.4900	4.28173
Valid N (listwise)	100				

Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 4. Hasil Analisis Linear Berganda**

Modal		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.845	.447		-1.887	.062
	Kesejahteraan Masyarakat	1.124	.083	1.068	13.467	.000
	Kemampuan daya beli	-.196	.168	-.093	-1.168	.246

$$Y = -0,845 + 1,124X_1 - 0,196X_2 + e$$

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memahami keterkaitan antara kemampuan daya beli, kesejahteraan masyarakat, dan PPN 12%. Hasil Standardzed Coefficients Beta untuk dapat dilihat dengan Tabel 4. Dengan dirumuskan dengan persamaan diatas. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli berpengaruh signifikan terhadap kenaikan ppn 12% dengan koefisien regresi negatif 13.467. dan kemampuan daya beli berpengaruh signifikan terhadap kenaikan ppn 12% dengan koefisien regresi positif 1.068.

Uji Hipotesis**a. Uji T****Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis t x1 dan x2 terhadap Y**

	Mode	Unstandardized Coefficients Beta		Standardized Coefficients Betta	t	Sig.
	Model	B	Std. Error			
1	(Constant)	-.845	.447		-1.887	.062
	Kemampuan daya beli	-.196	.168	-.093	-1.168	.246
	Kesejahteraan masyarakat	1.124	.083	1.068	13.467	.000

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji T nilai signifikansi kemampuan daya beli terhadap kenaikan PPN 12% ditunjukkan pada kolom 4, yaitu $0.246 > 0,05$ dan nilai t hitung $-1.168 < 1.660$. dengan demikian, kenaikan PPN 12% tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan daya beli, artinya Hipotesis nol (H_0) ditolak. hal ini menunjukkan bahwa meskipun PPN 12% dinaikan maka hal tersebut tidak berdampak terhadap kemampuan daya beli. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kenaikan PPN 12% tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan daya beli (Prabawati & Supadmi, 2023; Sastri et al., 2024; Silalahi & Kurnia, 2024).

Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kenaikan PPN 12% dilihat dari nilai signifikansiyaitu $0.000 < 0.05$ dan t hitung $13.467 > 1.660$ memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya Hipotesis 1 (H_1) diterima, Hal ini dikarenakan kenaikan PPN 12% mempengaruhi pola konsumsi dan daya beli masyarakat, sementara penerimaan pajak yang meningkat dapat mendukung program kesejahteraan jika dikelola secara efektif oleh pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti terdahulu (Thiele, 2010; Marscal & wemer, 2018; Fitriani & Susanti, 2014).

b. Uji F**Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis F x1 dan x2 terhadap Y**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1739.829	2	869.915	1122.682	.000 ^b
	Residual	75.161	97	.775		
	Total	1814.990	99			

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji F nilai signifikansi kemampuan daya beli terhadap kenaikan PPN 12% ditunjukkan pada tabel 5, yaitu $0.000 > 0,05$ dan nilai F hitung $1122.682 > 3.936$. dengan demikian kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh signifikan terhadap kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pengaruh gabungan antara kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat terhadap kenaikan PPN 12% yang di analisis bersamaan menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap kenaikan PPN 12%. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung (1122,682) lebih besar dari F tabel (3,936), yang menunjukkan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang kuat dan signifikan

antara kenaikan PPN 12% dengan kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PPN 12% dapat mempengaruhi daya beli masyarakat karena pajak yang lebih tinggi meningkatkan harga barang dan jasa, terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat terpengaruh akibat meningkatnya beban pengeluaran, terutama kelompok menengah keatas yang terdampak langsung.

c. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.979 ^a	.959	.958	.88026

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,959 atau 95,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, memberikan kontribusi sebesar 95,9% terhadap kenaikan PPN 12%, sementara 4,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas dalam kajian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Enríquez & Echevarría, 2016; Islamiah, 2024; Mariscal & Werner, 2018).

4. KESIMPULAN

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mengurangi defisit APBN, terutama setelah pandemi COVID-19. Kenaikan ini lebih ditekankan pada barang dan jasa mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dikenakan tarif 0%. Dampaknya lebih dirasakan oleh kelas menengah ke atas dengan peningkatan pengeluaran tahunan sekitar Rp4,2 juta, yang dapat memengaruhi tabungan, investasi, serta pola konsumsi. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah mengalami tekanan ekonomi akibat melemahnya daya beli dan meningkatnya ketergantungan pada utang. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden menunjukkan bahwa kenaikan PPN berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan risiko peningkatan inflasi serta perubahan pola konsumsi. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan Upaya antisipatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, seperti pemberian insentif pajak bagi kelompok rentan atau subsidi pada barang kebutuhan pokok. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dalam memahami dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kenaikan PPN terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., Maisaroh, S., Ananta, A. F., & Pangestoeti, W. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12 % terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. 42.
- Thiele, S. (2010). Erhöhung der Mehrwertsteuer für Lebensmittel: Budget- und Wohlfahrtseffekte für Konsumenten / Increase of the Value Added Tax (VAT): Budget- and Welfare- Effects for Consumers. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 230(1), 115-130. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2010-0108>
- García-Enríquez, J., & Echevarría, C. A. (2016). Consistent estimation of a censored demand system and welfare analysis: The 2012 VAT reform in Spain. *Journal of Agricultural Economics*, 67(1), 84-103. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12119>
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. 9(2), 67–78.
- Fitriani, K. L., Terbuka, U., Susanti, F., & Terbuka, U. (2025). Dampak kenaikan tarif ppn terhadap tingkat kemiskinan di indonesia. 2(1), 20–31.
- Islamiah, N. (2025). Macroeconomics and social inequality: Examining the role of purchasing power in affecting income and poverty levels. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(1), 38-45. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i1.833>

- Hajatina, U. H. (2024). TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI Akademi Perniagaan dan Perusahaan Apipsu , Manajemen perusahaan Fakultas bisnis dan Humainora , Universitas Tjut Nyak Dhien , Manajemen Email author : arsyie2@gmail.com Pendahuluan Peningkatan tar. 3(2), 36–51.
- Kisdayanti, L., Farida, N., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Surabaya, P. (2025). DAMPAK WACANA KENAIKAN PPN 12 % BAGI PELAKU UMKM DI SURABAYA. 4(3), 1112–1125. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.303>
- Lee, M., & Harianto, D. (n.d.). MENENGAH Dengan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 18–29.
- Manik Sastri, I. I. D. A. M., Datrini, L. K., Pertamawati, N. P., & Prama Yoga, I. G. A. (2024). Increasing Value Added Tax (VAT) Rates on Community Purchasing Power and Economic Stability. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 07(06), 3463–3471. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-40>
- Mariscal, R., & Werner, A. (n.d.). The price and welfare effects of airline alliances..pdf.
- Podungge, S., & Ajuna, L. H. (2024). Efek kenaikan ppn di indonesia. 5, 121–130.
- Prabawati, I. A. A., & Supadmi, N. L. (2023). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Daya Beli Konsumen. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11), 3104–3116. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i11.p20>
- Silalahi, H., & Kurnia, B. (2025). Analysis of VAT Rate Increase : Social Justice and Strengthening Sustainable Economic Growth. 01(January), 479–492.
- Tarmizi, M. M. (2023). Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>.